



Perbandingan Sistem Politik Demokrasi dan Otoriter (Studi Kasus Korea Selatan dan Korea Utara)

Sofia Wardah¹, Gili Argenti², Prilla Marsingga³

¹Mahasiswi Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 20 April 2025

Revised: 27 April 2025

Accepted: 01 Mei 2025

Abstract

In Indonesia, teachers' ability to undertake research is still below average. This is due to a lack of research knowledge and experience among teachers. As a result, teachers rarely conduct research and have never published a scientific paper. As a result, mentoring in the form of formal training in research competence is required. There is, however, no training structure designed expressly for instructors to improve their research competency. The goal of this study is to create a training system that will eventually improve instructors' research skills. The research and development process is based on a modified Dick & Carey development model. As a result, an upgraded teacher competency training system including training modules, training agendas, teaching books, and learning videos has been developed and tested by specialists. Teachers in Indonesia are expected to use the training system to increase their research skills.

Keywords: Comparative Political Systems, Democracy, Authoritarian.

How to Cite: Wardah, S., Argenti, G., & Marsingga, P. (2025). Perbandingan Sistem Politik Demokrasi dan Otoriter. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.C), 189-194. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11938>

INTRODUCTION

Sistem politik suatu negara merupakan cermin dari nilai, prinsip, dan dinamika yang membentuk tata kelola politiknya. Perbandingan antara sistem politik demokrasi dan otoriter menjadi tema penting dalam kajian ilmu politik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap partisipasi politik, hak asasi manusia, dan perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian ini mengambil pendekatan studi kasus untuk membandingkan dua negara bersejarah yang berbagi batas wilayah, namun menganut model sistem politik yang berbeda: Korea Selatan, yang mengadopsi demokrasi liberal, dan Korea Utara, yang menegakkan sistem otoriter dengan kendali penuh pemerintah.

Korea Selatan, yang resmi dikenal sebagai Republik Korea, telah mengalami transformasi yang menakjubkan sejak akhir Perang Dunia II. Setelah pembebasan dari penjajahan Jepang pada tahun 1945, semenanjung Korea dibagi menjadi dua zona pendudukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1948, dibentuklah dua entitas terpisah, yaitu Republik Korea di bawah pengaruh Amerika Serikat di selatan dan Republik Rakyat Demokratik Korea di bawah pengaruh Uni Soviet di utara. Korea Selatan awalnya mengalami fase yang sulit, termasuk Perang Korea pada tahun 1950-1953 yang melibatkan konflik antara Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat dan Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok. Pasca perang, Korea Selatan mengalami periode otoriterisme di bawah pemerintahan Presiden Park Chung-hee yang berkuasa dari tahun 1961 hingga 1979. Namun, sejak akhir 1980-an, Korea Selatan beralih

menuju sistem politik demokratis dengan terjadinya gerakan reformasi dan perubahan dalam pemerintahan (Bachitar, 2021). Di sisi lain semenanjung, Republik Rakyat Demokratik Korea, atau yang lebih dikenal sebagai Korea Utara, diproklamkan pada 9 September 1948, dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin pertamanya. Kim Il-sung memimpin Korea Utara melalui Perang Korea dan pemerintahan yang kuat hingga kematiannya pada tahun 1994. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-il dan kemudian Kim Jong-un, Korea Utara tetap sebagai negara yang diperintah oleh satu keluarga dan sistem politik otoriter yang dikenal dengan "Juche," suatu ideologi yang menekankan kemandirian nasional dan pemujaan terhadap kepemimpinan.

Korea Selatan dan Korea Utara menawarkan gambaran unik tentang dua sistem politik yang tumbuh dari latar belakang sejarah dan ideologi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami perbedaan mendasar dalam struktur dan fungsi kedua sistem politik tersebut, serta untuk memahami konsekuensi dan dampaknya terhadap kehidupan politik dan sosial masyarakat di kedua negara. Melalui penelitian ini, kami berupaya menganalisis dinamika yang memandu kebijakan, pengambilan keputusan, dan hubungan dengan masyarakat dalam kerangka demokrasi dan otoritarianisme.

Dengan mengintegrasikan teori-teori ilmu politik, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem politik Korea Selatan dan Korea Utara, tetapi juga memberikan kontribusi pada wawasan umum mengenai perbandingan sistem politik global. Implikasi temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan pemahaman yang lebih kaya akan peran sistem politik dalam membentuk arah perkembangan suatu negara.

METHODS

Pada penelitian tersebut memakai metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode yang berfungsi sebagai mencari, mengamati suatu fenomena dengan menginterpretasi suatu fenomena atau permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian dengan menggunakan data yang berupa studi literatur penelitian yang tersedia, studi kepustakaan sebagai menggali informasi berkaitan perbandingan sistem politik demokrasi dan otoriter politik dengan studi kasus di Korea Selatan dan Korea Utara. Pada metode penelitian tersebut dengan mengadopsi pendekatan perbandingan politik untuk dapat menganalisis sistem politik di dua negara Korea, yakni pada Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu kajian hubungan Internasional pada semenanjung Korea merupakan bukti kuat dari pengaruh perang dingin yang mempengaruhi Asia Timur. Pada sistem pemerintahan Korea Selatan menggunakan sistem yang bersifat presidensial yang berbentuk pada republik demokrasi. Pada tahun 2004, Korea Selatan juga mengalami berbagai perubahan dalam tata aturan dalam pemilu menjadi sistem campuran, dengan pemilu campuran pada pembagian kursi di parlemen tunggal. Sistem campuran ini dengan menggabungkan suatu pembagian dalam hal alokasi kursi untuk memilih pemilihan umum menjadi mayoritas dan proporsional. Korea Utara menganut sistem politik yang bersifat otoriter terbentuk atas prinsip sentralisasi yang dijalankan oleh negara

satu partai di bawah kepemimpinan oleh Partai Buruh Korea. (Hevriansyah, A; 2021).

RESULTS & DISCUSSION

Sistem Pemerintahan Politik di Korea Selatan

Sistem politik Korea Selatan berdasarkan pada UUD 1987 adalah republik demokrasi perwakilan presidensial dengan presiden sebagai nama jabatan yang memimpin negara dan sistem multi partai. Presiden juga bertindak sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan dipilih secara langsung dengan masa jabatan sekitar 5 tahun. Dalam republik demokrasi perwakilan presidensial dengan presiden yang memimpin suatu negara dan sistem multi partai. Presiden juga bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dipilih secara langsung dengan masa jabatan sekitar 5 tahun (kompasiana, 2019). Presiden sebagai otoritas eksekutif, sedangkan Majelis Nasional sebagai otoritas legislatif. Masyarakat Korea Selatan memilih anggota Majelis Nasional di 226 daerah pemilihan dan 46 kursi tambahan diberikan kepada partai politik berdasarkan proporsi suara mereka.

Dalam politik Korea Selatan, Partai Demokrat Korea adalah partai liberal, Partai Kebebasan Korea adalah partai konservatif, Partai Rakyat (partai sayap tengah), dan Partai keadilan (partai sayap kiri). Saat ini, kelompok konservatif dan liberal berkuasa dalam mencakup politik Korea Selatan., dan juga Presiden memiliki kuasa yang kuat dalam memahami kepentingan negara, tetapi harus mematuhi batasan akan hak-hak politik dan kebebasan sipil rakyat Korea Selatan. Presiden juga perlu untuk bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan dan kehidupan negara, serta menghormati perbedaan politik dan ideologis. Selain itu, Korea Selatan juga mempunyai keterlibatan dalam hal hubungan internasional yang bagus, terutama Amerika Serikat, yang memainkan peran penting dalam memahami suatu sistem demokrasi di negara tersebut.

Demokrasi di Korea Selatan mendeskripsikan bahwa negara ini bukan negara yang dikuasai oleh satu orang yang berkuasa (diktator), dan perolehan suara tipis dalam pemilihan Presiden menunjukkan bahwa dua calon Presiden bersaing dan seimbang dalam mengambil tindakan. Dalam pembagian pada sistem pemerintah terdapat 3 cakupan yakni sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

a. Eksekutif, sebagai berikut:

1. Presiden memiliki tugas sebagai pemimpin negara yang memiliki jabatan sebagai kepala negara, dan bertanggung jawab sebagai kepala pemerintahan.
2. Perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab sebagai wakil Presiden dalam memimpin pemerintah. Perdana Menteri dipilih oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Menteri-menteri diangkat oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada perdana Menteri.

b. Legislatif, sebagai berikut:

1. Majelis Nasional: Di tingkat nasional, badan legislatif terdiri atas Majelis Nasional Korea Selatan, yang terdiri atas 17 komite tetap untuk membahas masalah kebijakan secara terperinci.

2. Anggota Majelis Nasional menjabat selama empat tahun, dan pemilihan sela diadakan jika anggota tidak dapat menyelesaikan masa jabatannya.
- c. Yudikatif:
1. Hakim: Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh Presiden dan dewan perwakilan Hakim biasanya menjabat selama 5 tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.

Sistem Pemerintah Politik Di Korea Utara

Korea Utara menganut sistem politik yang bersifat otoriter terbentuk atas prinsip sentralisasi dan dijalankan oleh negara satu partai di bawah kepemimpinan oleh Partai Buruh Korea. Sistem politik tersebut dinamakan monarki absolut. Konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya terdapat batasan terhadap pada suatu kebebasan mencakup berekspresi, dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Sukses dari Kim Il Sung, Kim Jong Il hingga Kim Jong-Un ternyata tidak menghilangkan dinamika otoritarian di Korea Utara. Kim Jong-Un menggunakan manipulasi dari fungsi partai politik untuk menjaga citra sehingga seolah-olah Korea Utara berkembang sebagai negara demokratis.

Dampak Sistem Pemerintah Politik Otoriter Korea Utara Terhadap Masyarakat

Sistem politik otoriter di Korea Utara mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Segala suatu kepentingan mengea urusan rakyat diatur oleh negara, dan kebebasan berekspresi juga kerap di kontrol oleh pemerintah disana. Pemerintah secara ketat mengawasi kehidupan warga itu sendiri, dan suksesi dari pemimpin otoriter seperti Kim Jong-Un tidak menghilangkan dinamika otoritarian di negara tersebut. Kekuasaan yang tersentralistik dan dominasi pada bidang politik juga memengaruhi kehidupan masyarakat, serta adanya pembatasan-pembatasan pada bidang keagamaan. Selain itu, Korea Utara memiliki tantangan pada periode panjang krisis ekonomi, dan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan terhambat oleh tekad Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik.

Analisis Perbedaan Sistem Pemerintahan Politik Korea Selatan Dengan Korea Utara

Korea Utara memiliki konstitusi yang ketat yang mengatur segala aturan pemerintahannya. Democratic People's Republic of Korea (DPRK) membuat konstitusi pertamanya pada tahun 1948. Pada tahun 1972, konstitusi baru dibuat daripada konstitusi yang terdahulu. Pada tahun 1992, 1998, 2009, dan 2016, revisi berikutnya dilakukan. Pada tahun-tahun setelah kematian Kim Il Sung, yang menjabat sebagai pemimpin negara dari tahun 1948 hingga tahun 1994, kemudian amandemen 1998 dibuat (Reditya, T. H., 2021). Lembaga Legislatif nasional Korea Utara dinamakan dengan Supreme People's Assembly (SPA). Lembaga Legislatif nasional memilih anggota kabinet dibantu oleh sebagian dari wakil perdana menteri (Tanuwijaya, P., Trianata, D., & Hasiholan, Y, 2022).

Perbedaan sistem pemerintahan antara Korea Selatan dan Korea Utara yakni sebagai berikut:

Korea Selatan

1. Pada sistem pemerintahan berbentuk republik konstitusional dengan sistem presidensial yang kuat
2. Kepala Negara yang dipimpin oleh satu orang Presiden yang dipilih dengan cara pemilu dengan masa jabatan sekitar 5 tahun
3. Partai Politik dengan menggunakan suatu sistem yang bernama Sistem multi-partai dengan beragam partai politik yang aktif
4. Asas menganut pada asas demokrasi liberal.

Korea Utara

1. Sistem Pemerintahan berbentuk negara komunis dengan sistem satu partai, di mana Partai Buruh Korea (KWP) adalah satu-satunya partai politik yang diizinkan.
2. Kepala Negara dipimpin oleh pemimpin tertinggi yang memiliki power sebagai kekuasaan absolut.
3. Partai Politik: Hanya terdapat satu partai politik, yakni Partai Buruh Korea (KWP).
4. Kontrol Elit Pemerintahan: Pemerintah berhasil mengontrol penuh kalangan elit pemerintahan untuk menjalankan kepentingannya.

Dalam perbedaan dari adanya perbandingan politik di kedua negara tersebut terletak pada sistem pemerintahan, kepala negara, partai politik, dan asas pada membentuk sistem pemerintahan, kepala negara, partai politik, dengan asas yang membentuk pada sistem pemerintahan. Selanjutnya kebijakan politik nasional Korea Utara berbasis pada ideologi komunis yang berbasis totalitarian state, yang digagas oleh Kim II sung dengan mendirikan KWP tahun 1945 dengan berbasis struktur Partai komunis uni Soviet (Abidin, N. F. , 2020)

CONCLUSION

Dalam sistem demokrasi yang dilakukan di Korea Selatan, keikutsertaan dalam politik sangat dihargai dikarenakan masyarakat memiliki hak untuk memilih suatu tokoh publik dan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi yang dikemukakan dan dapat juga mengkritik pemerintah yang merupakan bagian dari demokrasi dan oleh masyarakat itu sendiri. Disisi lain dari Korea Utara keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik kerap kali di kontrol dan memegang kendali adalah pemerintahan yang memiliki power yang kuat atas kehidupan publik hal ini dikarenakan Korea Utara menganut sistem yang bersifat Otoriter dan media dikuasai oleh negarra dan dapat dijadikan sebagai alat propaganda.

REFERENCES

- Abidin, N. F. . (2020). Dinamika Politik, Heroifikasi Kim Il Sung, dan Ideologi Juchedi Korea Utara (1948-2011). *Jurnal Diakronika*, 20(1), 61-75.
- Bachitar, A. (2021). Sejarah Munculnya Korea Selatan dan Utara, Dua Negara Korban Adu Domba.

- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*.
- Kompasiana. (2019). Sistem Pemerintah Korea Selatan. Diambil kembali dari https://www.kompasiana.com/leeyuhan/5dac8eff0d8230569a1f9bc4/sistem-pemerintahan-korea-selatan#google_vignette
- Porutuo, Rivo. (2022). Sistem Politik Di Negara Korea Selatan. Diambil kembali dari https://www.academia.edu/35035438/SISTEM_POLITIK_DI_NEGARA_KOREA_SELATAN
- Reditya, T. H. (2021). Sistem Pemerintahan Korea Utara. Diambil kembali dari [kompas.com: https://internasional.kompas.com/read/2021/11/21/060000870/sistem-pemerintahan-korea-utara-menghamba-pada-juche-dan-satu-partai?page=all](https://internasional.kompas.com/read/2021/11/21/060000870/sistem-pemerintahan-korea-utara-menghamba-pada-juche-dan-satu-partai?page=all)
- Tanuwijaya, P., Trianata, D., & Hasiholan, Y. (2022). Analisis Pelanggaran HAM di Korea Utara. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 1(01).